

Studi Kajian Tingkat Kemiskinan di Kota Medan

Devani Pratiwi

Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: devanipratiwi69@gmail.com

Sisiliana

Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: sisiliana6@gmail.com

Edy Suprayetno

Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: dichan2078@gmail.com

Ulfah Setia Iswara

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
Email: ulfahsetiaiswara@stiesia.ac.id

Dewi Mahrani Rangkuty

Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: dewimahrani@dosen.pancabudi.ac.id

Korespondensi penulis: devanipratiwi69@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the level of poverty in the Medan city area and how the government's efforts or solutions in handling it. A descriptive qualitative study with a literature method through literature studies from journals of previous research results related to poverty-level studies. The data used in this study is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics of Medan City. The study results explain that Medan City has always tried to overcome the problem of poverty to the maximum; in fact, poverty is still a severe problem. Overcoming poverty requires integrating various development policies and programs in multiple sectors. The best way to fight poverty is to promote policies strengthening economic messages and positions. The driving factor of poverty in Medan City is uneven development.*

Keywords: *Government Solutions, Medan, Poverty, Development*

Abstrak. Studi kajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemiskinan di wilayah kota medan serta bagaimana upaya atau solusi pemerintah dalam menanganinya. Kajian deskriptif kualitatif dengan metode literatur melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal-jurnal hasil penelitian terdahulu yang berkaitan kajian tingkat kemiskinan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Medan. Hasil kajian menerangkan bahwa Medan senantiasa berupaya mengatasi masalah kemiskinan dengan maksimal, pada kenyataannya kemiskinan masih menjadi masalah yang sangat serius. Mengatasi kemiskinan memerlukan upaya untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan di berbagai sektor. Cara terbaik untuk memerangi kemiskinan adalah dengan mempromosikan kebijakan yang memperkuat pesan dan posisi ekonomi dalam perekonomian. Bahkan faktor pendorong angka kemiskinan di Kota Medan adalah pembangunan yang tidak merata.

Kata kunci: Kemiskinan, Medan, Pemerintah, Pembangunan

LATAR BELAKANG

Memasuki dekade kedelapan kemerdekaan, salah satu masalah utama di Indonesia yaitu penduduk miskin. Istilah kemiskinan timbul disaat seseorang ataupun segelintir orang tak bisa memenuhi taraf kesejahteraan ekonomi yang menjadi kebutuhan minimum dari standar kehidupan tertentu seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, pakaian, serta pekerjaan. Ketika sumber daya keuangan dan material tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fundamental seseorang, seseorang dikatakan berada dalam keadaan miskin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), orang dianggap miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. Karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan bertambahnya jumlah keluarga miskin, keadaan kemiskinan terus memburuk (Agasi, 2023) Faktor-faktor seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendidikan dan kemiskinan satu sama lain saling terkait dimana kemiskinan telah mejadi perhatian utama dalam perkembangan kebijakan sosial. Seperti yang diketahui bahwa pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan salah satunya mengurangi kemiskinan, dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan pada pendapatan secara terus menerus secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan yang dikatakan Sumitro (dalam Rumahorbo, 2014) pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita untuk menentukan pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas perkapita dengan meningkatkan modal peralatan dan keterampilan. Oleh karena itu dengan meningkatnya pendapatan per kapita, kesejahteraan akan meningkat dan kemiskinan berkurang.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Kemiskinan

Pada tahun 1990, World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal. Kemudian pada tahun tahun 2004, World Bank menguraikan kembali definisi kemiskinan secara lebih detail yaitu “Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal. Kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter. Kemiskinan adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya membaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, ketiadaan keterwakilan dan kebebasan”.

Tidak jauh berbeda dengan definisi World Bank, UNDP juga mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan atau air minum yang bersih, atau untuk mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan kata lain, UNDP memandang kemiskinan sebagai suatu masalah multidimensi yaitu tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya ekonomi. Secara literal, kemiskinan berdasar dari istilah miskin yang berarti tidak berharta benda. Kemiskinan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki persamaan arti dengan istilah kefakiran. Biasanya dari dua istilah ini disebutkan dengan bersamaan yaitu fakir miskin yang artinya orang yang sangat tidak mampu.

1. Kategori dibawah garis kemiskinan

Bappenas dalam (Amir Machmud, 2016:286) mengutarakan indikator kemiskinan yang berupa:

- 1) Sedikitnya pangan, pakaian, serta papan (rumah) kurang memadai
- 2) Hak milik tanah serta alat produktif yang terbatas
- 3) Rendahnya kemahiran membaca serta menulis
- 4) Minimnya agunan serta kemakmuran hidup
- 5) Kerentanan serta keterpurukan pada bidang ekonomi serta sosial
- 6) Ketidakmampuan ataupun daya tawar yang rendah
- 7) Terbatasnya akses ke ilmu pengetahuan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2008) indikator kemiskinan yaitu:

- 1) Tidak lebih dari 8m² per orang pada luas lantai bangunan rumah.
- 2) Berbahan dasar bambu, kayu, rumbia dinding tanpa diplester, bermutu rendah pada jenis dinding tempat tinggal.
- 3) Minimnya fasilitas buang air besar atau bersamaan dengan rumah tangga lain.
- 4) Minimnya penerangan untuk pencahayaan rumah tangga.
- 5) Kebutuhan air bersih bersumber dari air hujan, telaga, sungai.

2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro dalam Agustina (2018:269) terdapat 3 faktor penyebab kemiskinan yaitu:

- 1) Secara makro, kemiskinan timbul sebab terdapat perbedaan pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan, masyarakat miskin hanya mempunyai sumber daya dalam jumlah yang sedikit serta mutunya di bawah rata-rata.
- 2) Kemiskinan timbul sebab adanya ketidaksamaan mutu sumber daya manusia (SDM) yang rendah dan mengakibatkan produktivitasnya pun kecil, serta upahnya juga sedikit.
- 3) Kemiskinan timbul akibat ketidaksamaan akses serta modal. Karena pembatasan dan kurangnya akses manusia, mereka memiliki sedikit (jika ada) pilihan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka selain dari apa yang saat ini harus mereka lakukan (bukan apa yang harus dilakukan). Maka dari itu, dalam menentukan pilihan manusia memiliki keterbatasan yang berakibat terhambatnya kemampuan manusia untuk mengubah tingkat hidupnya.

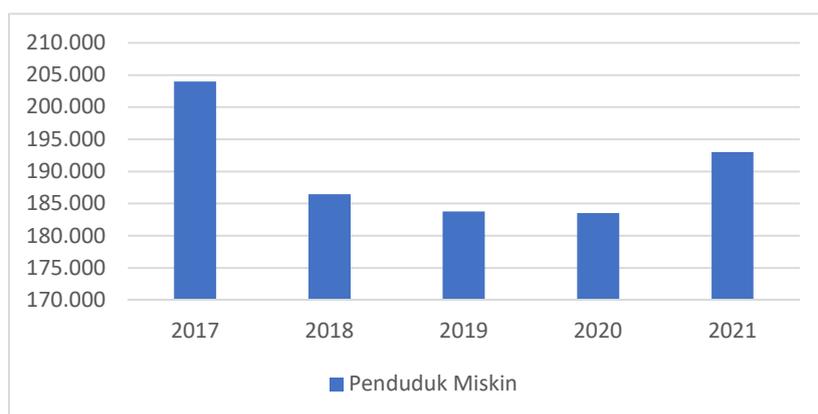
METODE PENELITIAN

Studi kajian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan metode literatur melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal-jurnal hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan, juga melalui akses data-data yang diperoleh dari *website* sebagai publikasi informasi. Kajian deskriptif kualitatif dapat diartikan bahwa peneliti sebagai instrumen kunci dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan penggabungan dan analisis data secara induktif (Sugiyono, 2012) sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif seperti menarasikan hasil wawancara dan atau observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab kemiskinan sangatlah kompleks sehingga pandangan dalam melihat berdasarkan persoalan nyata dalam masyarakat. Persoalan nyata dalam masyarakat biasanya karena adanya sebagian kelompok yang masuk dalam golongan tidak beruntung yaitu kemiskinan fisik yang lemah dan ketidakberdayaan pada umumnya. Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai pemerataan hasil pertumbuhan keseluruhan sektor usaha sangat dibutuhkan dalam upaya menurunnya tingkat kemiskinan. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah upah minimum. Upah Minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat pekerja dengan harapan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat (Ramadhani et al., 2022).

Dalam ukuran tingkat kemiskinan yang terdapat dikota Medan kita bisa lihat dari data BPS, Data BPS menggunakan konsep kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan selalu dilihat dalam kaitannya dengan ketidakmampuan suatu perekonomian untuk memenuhi kebutuhan utama seperti pangan, tetapi bukan pangan yang di lihat dari pengeluaran. Anda dapat melihat bahwa masyarakat atau masyarakat di bawah garis kemiskinan adalah mereka yang rata-rata biaya hidup per bulannya berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan.



Sumber: Data BPS Kota Medan, 2022

Gambar 1. Perkembangan Penduduk Miskin Kota Medan Tahun 2017 s/d 2021 (Ribu Jiwa)

Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin kota medan belum menurun dan tidak stabil. Dilihat tahun 2017 jumlah masyarakat di bawah garis kemiskinan dikota medan berjumlah 204 ribu jiwa, merupakan angka cukup tinggi, Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin turun 18.000, dan pada tahun 2019 saja jumlah masyarakat dibawah garis kemiskinan turun dikota medan sekitar 183 ribu jiwa namun pada tahun 2020 angka kemiskinan di kota Medan masih sekitar 183.000 orang, namun pada tahun 2021 angka kemiskinan di kota Medan akan meningkat drastis menjadi sekitar 193.000 orang.

Dari data di atas terlihat bahwa Kota Medan masih belum mampu menurunkan angka kemiskinan. Sebagai kota besar, Kota Medan sendiri seharusnya mampu mengatasi masalah kemiskinan dengan baik atau sebaik mungkin, namun pada kenyataannya masalah kemiskinan masih cukup serius, dengan 193.000 penduduk miskin bermukim di Kota Medan pada tahun 2021. Merupakan angka yang sangat tinggi. Kemiskinan perkotaan menimbulkan masalah sosial seperti kejahatan kerah putih, pembobolan, dan kejahatan seperti pencurian. Salah satu penyebab angka kemiskinan di kota Medan adalah pembangunan infrastruktur yang tidak merata antara pusat kota dan wilayah Medan Utara sebagaimana kita ketahui jumlah penduduk miskin di wilayah kota Medan Utara seperti Medan Deli dengan Rabhan Marelan karena pada

wilayah ini terkesan masih di abaikan serta di biarkan oleh Pemko Medan, Infrastruktur di wilayah tersebut juga masih buruk masih sering terjadi banjir. Dan Faktor yang terpenting yaitu pemerintah medan membutuhkan pemimpin yang benar-benar peduli dalam menanggulangi kemiskinan serta pembangunan infrastruktur yang merata di berbagai sektor dan wilayah. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 angka kemiskinan naik beriringan dengan minimnya pendapatan masyarakat yang menimbulkan banyaknya tingkat pengangguran (Potensi et al., 2022). Untuk memerangi kemiskinan, pemerintah pusat menawarkan berbagai program bantuan sosial. Agar bantuan ini bisa sampai kepada mereka yang membutuhkan, Pemkot Medan harus bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat. Kota Medan sendiri membutuhkan pemimpin yang bisa menjaga masyarakat, khususnya dalam hal kesejahteraan warganya. Mengembangkan usaha kecil dan menengah adalah salah satu cara untuk memerangi kemiskinan.

Integrasi strategi dan inisiatif pembangunan di berbagai sektor diperlukan untuk memerangi kemiskinan. Ada dua jenis program untuk memberantas kemiskinan: kebijakan langsung dan tidak langsung. Kebijakan tidak langsung membantu mengurangi kemiskinan dengan memperbaiki situasi ekonomi secara keseluruhan dalam masyarakat, sementara kebijakan langsung memberikan bantuan keuangan langsung kepada individu atau keluarga berpenghasilan rendah. Kebijakan tidak langsung meliputi (1) upaya meningkatkan stabilitas ekonomi, sosial dan politik, dan (2) pengelolaan penduduk. (3) meningkatkan keamanan lingkungan melalui pelatihan serta penyiapan kelompok masyarakat dibawah garis kemiskinan; Kebijakan langsung termasuk mengembangkan lebih luas basis data dasar untuk menargetkan populasi tertentu yang ingin kami bantu, menyediakan kebutuhan pokok, dan perawatan kesehatan, menciptakan lapangan kerja, serta menyediakan layanan kredit.

Terdapat tiga cara untuk memberdayakan masyarakat dibawah garis kemiskinan. Salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan fokus pada kebutuhan masyarakat miskin. Kedua, bekerja sebagai tim untuk mengatasi tantangan yang kita hadapi akan menjadi yang paling efektif. Ketiga, pendekatan pendampingan melibatkan penggunaan asisten profesional yang membantu memfasilitasi, mengomunikasikan, dan memberi energi pada kelompok orang miskin saat mereka bekerja untuk mencapai kemandirian. Peran pemerintah sebagaimana diuraikan di atas adalah dengan menerbitkan program pengentasan kemiskinan (Ramadhani et al., 2022). Program tersebut bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 No. 5 Tahun 2015 yaitu:

1. Bantuan pangan Pemerintah daerah telah memberikan bantuan pangan sebagai berikut:

a. BANSOS (Bantuan Sosial)

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, bantuan sosial merupakan salah satu bentuk dukungan finansial atau material nonselektif yang tidak berkelanjutan.

b. BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Program bantuan tunai adalah program bantuan tunai pemerintah yang membantu orang miskin dengan memberi mereka uang.

c. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

Setiap bulannya, keluarga penerima manfaat menerima bantuan sembako nontunai atau disebut juga dengan bantuan sembako dari pemerintah melalui mekanisme akun elektronik yang hanya digunakan untuk pembelian sembako di kelompok usaha elektronik Warung Gotong Royang yang dikenal dengan KUBE PKH. Bank (BTN, BNI, BRI, dan Bank Mandiri) dapat mengambil tindakan hukum terhadap penjual makanan yang mengancamnya.

2. Bantuan Kesehatan

Bantuan kesehatan diberikan dalam bentuk PKH Kesehatan. Program PKH berfokus pada pengurangan gizi buruk pada bayi dan ibu hamil serta peningkatan kesehatan mereka.

3. Bantuan pendidikan

PKH memberikan bantuan kepada siswa dalam upaya pendidikan mereka. Sektor pendidikan PKH memberikan akses layanan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak.

4. Bantuan perumahan

Permukiman kumuh karena masih banyak masyarakat yang tinggal di rel kereta api dan di tepi bantaran sungai. Akibat dari keadaan tersebut, Dinas Perumahan membantu masyarakat miskin yang masih belum mampu untuk tinggal di rumahnya sendiri dengan merenovasi rumahnya.

5. Bantuan peningkatan keterampilan

Program pembelajaran yang disebut peningkatan keterampilan/kemampuan disiapkan untuk memberi orang kesempatan belajar untuk memajukan pemikiran, pengetahuan, dan keterampilan mereka.

6. Bantuan modal usaha

Pemerintah menawarkan bantuan keuangan kepada komunitas Nelayan Indah. Masyarakat ini tergolong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan dengan

bantuan UMKM diberikan hibah tunai sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Pemerintah mendukung nelayan Indah yang menerima uang tunai sebagai usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) dengan dukungan dari UMKM. Rp2.400.000 (2 juta 400 ribu rupiah), biaya ini untuk pengembangan usaha.

7. Bantuan perlindungan rasa aman.

Pemerintah membentuk Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), untuk melindungi masyarakat.

Jika ini dilakukan secara optimal, jumlah penduduk miskin di Kota Medan pasti akan berkurang dari tahun ke tahun. Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan bersama menurut prinsip-prinsip nasihat dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan, bahwa kepentingan bersama didahulukan dari kepentingan pribadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Kota Medan senantiasa berupaya mengatasi masalah kemiskinan dengan maksimal, pada kenyataannya kemiskinan masih menjadi masalah yang sangat serius. Mengatasi kemiskinan memerlukan upaya untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan di berbagai sektor. Cara terbaik untuk memerangi kemiskinan adalah dengan mempromosikan kebijakan yang memperkuat pesan dan posisi ekonomi dalam perekonomian. Bahkan faktor pendorong angka kemiskinan di Kota Medan adalah pembangunan yang tidak merata.

Kepada pemerintah Kota Medan untuk terus fokus pada program dalam menanggulangi kemiskinan pada daerah-daerah di kota Medan yang masih tertinggal misalnya di permukiman pada perbatasan sungai. Untuk peneliti selanjutnya penulis berharap agar dapat mengkaji tingkat kemiskinan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di kota Medan yang dimaksud untuk melihat apa saja faktor penyebab dan bagaimana cara menanggulunginya.

DAFTAR REFERENSI

- Agasi, A. (2023). *Peran Pemerintah dalam Pengetasan Kemiskinan di Kota Medan*. 2(April), 247–252.
- Di, T., Utara, S., & Ratulangi, U. S. (2018). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.3 (2018)*. 19(3), 86–103.
- Ekonomi, P. (n.d.). *Perekonomian indonesia*.
- Kurniawan, A. (2014). *Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis: Teori, Konsep & Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengelolaan Data dengan IBM SPSS 22.0)*. ALFABETA.

- Potensi, J., Studi, P., Perencanaan, M., & Universitas, W. (2022). *Jurnal Potensi Program Studi Magister Perencanaan Wilayah Universitas Batam Volume 2 , Issue 2, September 2022.* 2(2), 32–43.
- Ramadhani, H., Utara, S., Afria, N., Safitri, N., Utara, S., Nasution, W., Utara, S., & Nasution, J. (2022). *TINGKAT KEMISKINAN DI WILAYAH KOTA MEDAN.* 1(4), 34–45.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif.* ALFABETA.
- Yuspira, Pipit. 2023. *Studi Kajian Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Deli Sedang.* *Jurnal Mahasiswa Kreatif* Vol. 1 (4) Hal. 228-234.